

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Landasan Teori

2.1.1 *New Public Management (NPM)*

New Public Management (NPM) atau yang dikenal sebagai Manajemen Publik Baru di Indonesia merupakan pendekatan dalam pelaksanaan pelayanan publik yang dikelola oleh organisasi publik atau pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang berfokus pada keyakinan bahwa manajemen di sektor bisnis lebih efisien dibandingkan dengan manajemen birokrasi yang selama ini diterapkan, sehingga perlu dilakukan perubahan. Denhardt & Denhardt (2013) menyatakan bahwa NPM mencakup serangkaian ide dan praktik kontemporer yang pada dasarnya mengadaptasi pendekatan sektor swasta dan bisnis dalam sektor publik. NPM telah menjadi norma yang mencerminkan perubahan signifikan dalam pandangan tentang peran administrator publik. Loeffler & Bovaird (2019) menjelaskan bahwa NPM adalah gerakan untuk merampingkan sektor publik, menjadikannya lebih kompetitif, serta berupaya menjadikan administrasi publik lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dengan mengutamakan pengukuran ekonomi, efisiensi dan efektivitas (*value for money*), fleksibilitas dalam pilihan, dan transparansi.

Penerapan konsep NPM dapat dipandang sebagai suatu bentuk modernisasi atau reformasi manajemen dan administrasi publik, depolitisasi kekuasaan, atau desentralisasi wewenang yang mendorong demokrasi.

Perubahan tersebut juga telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat (Hughes, 2013). NPM telah dikenal sebagai reformasi brilian terhadap pelayanan organisasi publik pada tahun 1990-an. Menurut Hood (1991), beberapa aspek penting yang menjadi perhatian dalam paradigma baru ini diantaranya: Manajemen profesional di sektor publik, adanya standar kinerja dan ukuran kinerja, penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian *output* dan *outcome*, pemecahan unit-unit kerja di sektor publik, menciptakan persaingan di sektor publik, pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik, dan penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam menggunakan sumber daya (Rammohun & Mahavidyalaya, 2021).

Implementasi konsep NPM dapat dipandang sebagai suatu bentuk modernisasi atau reformasi manajemen dan administrasi publik, depolitisasi kekuasaan, atau desentralisasi wewenang yang mendorong demokrasi. Beberapa pihak meyakini bahwa paradigma NPM merupakan sebuah fenomena internasional sebagai bagian dari proses global. Konsep NPM begitu cepat mempengaruhi praktik manajemen publik di berbagai negara sehingga membentuk sebuah gerakan yang mendunia (Schedler & Proeller, 2021).

NPM ini telah mengalami berbagai perubahan orientasi, yaitu: 1) *Orientasi The Drive*, yaitu mengutamakan nilai efisiensi dalam pengukuran kinerja. 2) *Orientasi Downsizing and Decentralization* yaitu mengutamakan penyederhanaan struktur, memperkaya fungsi dan mendelegasikan otoritas

kepada unit-unit yang lebih kecil agar dapat berfungsi secara cepat dan tepat.

3) *Orientasi in Search of Excellence* yaitu mengutamakan kinerja optimal dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) *Orientasi Public Service* yaitu menekankan pada kualitas, misi dan nilai-nilai yang hendak dicapai organisasi publik, memberikan perhatian yang lebih besar kepada aspirasi, kebutuhan dan partisipasi *user* dan warga masyarakat, termasuk wakil-wakil mereka menekankan *social learning* dalam pemberian pelayanan publik dan penekanan pada evaluasi kinerja secara berkesinambungan, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas.

Osborne & Gaebler (2013) memperkenalkan konsep *reinventing government* yang sangat sesuai dengan pemahaman tentang *New Public Management (NPM)*. Dalam konsep ini, Osborne & Gaebler mengajukan sepuluh prinsip pemerintahan dengan semangat kewirausahaan, yaitu:

a. Pemerintahan katalis

Pemerintahan katalis adalah pemerintahan yang lebih fokus pada pengarah daripada pelaksana. Dalam hal ini, pemerintah berperan dalam fungsi strategis tanpa terlibat langsung dalam pelaksanaan teknis. Tugas pemerintah meliputi perencanaan, penciptaan visi, serta penyediaan kebijakan strategis. Untuk mencapai tujuan organisasi publik, berbagai metode dapat dipilih yang paling sesuai untuk mencapai efisiensi, efektivitas, kesetaraan, akuntabilitas, dan fleksibilitas. Metode-metode tersebut termasuk privatisasi, pemberian lisensi, konsesi, kerjasama operasional, kontrak, voucher, insentif pajak, dan lainnya.

b. Pemerintahan milik masyarakat

Menekankan kontrol masyarakat sebagai hasil dari pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah, yang memungkinkan masyarakat menjadi lebih mandiri dan kreatif dalam menyelesaikan masalah mereka tanpa bergantung pada pemerintah. Akibatnya, masyarakat mulai melayani dirinya sendiri, sementara pemerintah tetap memastikan bahwa kebutuhan dasar mereka tetap terpenuhi. Dengan adanya kontrol dari masyarakat, pegawai negeri akan menunjukkan komitmen yang lebih tinggi, lebih peduli, dan lebih inovatif dalam mengatasi berbagai masalah.

c. Pemerintahan kompetitif

Pemerintahan yang mengintegrasikan semangat kompetisi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat, di mana masyarakat berperan sebagai konsumen yang memiliki hak untuk memilih layanan terbaik. Akibatnya, pemerintah berlomba-lomba untuk memberikan layanan yang paling unggul.

d. Pemerintahan yang digerakkan oleh misi

Pemerintahan yang mampu mengubah orientasi dari yang berfokus pada aturan menjadi yang berfokus pada misi. Ini berarti bahwa pemerintah tidak harus selalu terikat oleh aturan, yang seringkali membuatnya lamban dan terlalu prosedural. Dengan berorientasi pada misi, pemerintah menekankan tujuan utama dalam menjalankan fungsinya, sehingga dapat bergerak lebih cepat dan efisien.

e. Pemerintahan yang berorientasi hasil

Pemerintahan yang fokus pada pendanaan berbasis hasil daripada input. Dalam hal ini, pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin karena penghargaan yang diterima didasarkan pada hasil yang dicapai oleh masing-masing instansi. Dengan demikian, kinerja pemerintah akan meningkat guna memperoleh penghargaan yang layak.

f. Pemerintahan yang berorientasi pelanggan

Pemerintahan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat daripada mengikuti birokrasi. Pemerintah mengutamakan apa yang diinginkan oleh masyarakat, bukan sekadar menjalankan pelayanan sesuai aturan birokrasi. Dalam hal ini, pemerintah perlu melakukan survei untuk mengidentifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat, sehingga pemerintahan dapat menjadi lebih efektif dan efisien.

g. Pemerintahan wirausaha

Pemerintahan yang fokus pada menghasilkan keuntungan daripada menghabiskan sumber daya. Pemerintah berusaha untuk mengoptimalkan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh instansi pemerintah, mengubah aset yang tidak produktif menjadi produktif dan meningkatkan produksi yang rendah menjadi tinggi. Ini dilakukan dengan mengadopsi prinsip-prinsip kerja sektor swasta yang relevan dalam administrasi publik. Contoh nyata dapat dilihat pada BUMN/BUMD yang dimiliki oleh pemerintah.

h. Pemerintahan antisipatif

Pemerintahan yang berfokus pada pencegahan daripada penyembuhan. Pemerintah yang antisipatif adalah pemerintah yang berpikir jauh ke depan, berusaha mencegah munculnya masalah daripada hanya menyelesaikannya. Hal ini dilakukan melalui perencanaan strategis, penciptaan visi masa depan, serta berbagai metode lainnya untuk memproyeksikan masa depan.

i. Pemerintahan desentralisasi

Mengubah pemerintahan yang digerakkan oleh hierarki menjadi pemerintahan yang bersifat partisipatif dan berorientasi pada kerja tim. Pemerintah yang desentralisasi memberikan sebagian wewenang dari pusat kepada daerah melalui organisasi atau sistem yang ada. Dengan demikian, pegawai di tingkat daerah dapat memberikan pelayanan langsung dan membuat keputusan secara mandiri, yang pada akhirnya menciptakan efisiensi dan efektivitas.

j. Pemerintahan yang berorientasi pasar pemerintahan yang mendorong perubahan melalui pasar

Pemerintah yang berorientasi pada pasar seringkali memanfaatkan struktur pasar swasta untuk mengatasi masalah, alih-alih bergantung pada mekanisme administratif, seperti pemberian pelayanan atau pengendalian melalui peraturan. Dengan menciptakan insentif keuangan, seperti insentif pajak, dan lain sebagainya, pemerintah dapat mendorong organisasi swasta atau masyarakat untuk bertindak dengan cara yang mendukung penyelesaian masalah sosial.

Menurut Hood (1991) konsep NPM memiliki tujuh komponen utama, yaitu:

a. Manajemen profesional di sektor publik

NPM menghendaki organisasi sektor publik dikelola secara profesional. Konsekuensi dilakukannya manajemen profesional di sektor publik adalah adanya kebebasan dan keleluasaan manajer publik untuk mengelola secara akuntabel organisasi yang dipimpinnya. Manajemen profesional mensyaratkan ditentukannya batasan tugas pokok dan fungsi serta deskripsi kerja yang jelas.

b. Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja

NPM mensyaratkan organisasi memiliki tujuan yang jelas dan ada penetapan target kinerja. Target kinerja tersebut merupakan kewajiban yang dibebankan kepada manajer atau personel untuk dicapai. Penetapan target kinerja harus dikaitkan dengan standar kinerja dan ukuran kinerja. Penetapan standar kinerja itu dimaksudkan untuk memberikan nilai terbaik (*best value*) dan praktik terbaik (*best practise*), sedangkan penetapan ukuran kinerja adalah untuk menilai kesuksesan atau kegagalan dalam mencapai target kinerja dan tujuan organisasi.

c. Penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome

Dalam konsep NPM, semua sumber daya organisasi harus dikerahkan dan diarahkan untuk mencapai target kinerja. Penekanannya adalah pada pemenuhan hasil (*outcome*), bukan pada kebijakan-kebijakan.

Pengendalian output dan outcome harus menjadi fokus utama perhatian organisasi, bukan lagi sekedar pengendalian input, misalnya anggaran, jumlah staf, material dan sebagainya. Salah satu contoh perubahan ini adalah penggunaan penganggaran kinerja.

d. Pemecahan unit-unit di sektor publik

Model organisasi sektor publik tradisional sangat didominasi organisasi birokrasi. Model organisasi birokrasi yang dikembangkan oleh Max Weber itu pada awalnya sangat kuat untuk meningkatkan efisiensi organisasi, akan tetapi seiring berjalannya waktu pola ini menjadi gagal karena semakin berkembang dan kompleksnya organisasi sektor publik sehingga hal ini mengakibatkan terjadinya kelembagaan organisasi karena sifat ini tersentralisasi. Konsep NPM menghendaki organisasi dipecah-pecah dalam unit kerja. NPM menghendaki adanya desentralisasi, devolusi dan pemberian wewenang yang lebih besar kepada bawahan. Tujuan pemecahan organisasi kedalam unit-unit kerja ini adalah efisiensi dan memangkas kelambanan birokrasi.

e. Menciptakan persaingan di sektor publik

Doktrin NPM menyatakan organisasi sektor publik perlu mengadopsi mekanisme pasar dan menciptakan persaingan. Tujuan menciptakan persaingan di sektor publik adalah untuk menghemat biaya. Untuk itu dilakukan mekanisme kontrak dan tender kompetitif dalam rangka penghematan biaya dan peningkatan kualitas serta privatisasi. Beberapa tugas pelayanan publik dapat diberikan kepada pihak swasta jika memang

hal ini lebih menghemat biaya dan menghasikan kinerja yang berkualitas. Selain itu, manfaat lainnya adalah mendorong sektor swasta dan sektor ketiga untuk berkembang.

f. Pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik

Konsep NPM berasumsi bahwa praktik manajemen di sektor swasta jauh lebih baik dibandingkan manajemen sektor publik. Beberapa praktik manajemen yang dianggap lebih baik antara lain penilaian kinerja, sistem kompensasi dan promosi didasarkan kinerja, manajemen biaya, struktur yang fleksibel, sistem akuntansi, dan penganggaran yang lebih maju. Diharapkan dengan diadopsinya praktik-praktik ini mampu mengembangkan manajemen sektor publik yang lebih baik.

g. Penekanan pada disiplin dan penghematan lebih besar dalam menggunakan sumber daya

NPM mensyaratkan organisasi sektor publik dapat memberikan perhatian yang besar terhadap penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien. Doktrin ini menghendaki organisasi sektor publik melakukan penghematan biaya-biaya langsung, meningkatkan disiplin pegawai, dan kegiatan yang mengarah pada peningkatan kualitas dengan harga murah.

2.1.2 Konsep e-Government

Heeks (2013) menyatakan bahwa *e-Government* adalah sebuah sistem informasi, yang dapat digambarkan sebagai sistem sosio-teknis karena merupakan kombinasi antara aspek sosial dan teknologi. World Bank mendefinisikan *e-Government refers to the use by government agencies of*

information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government (Indrajit, 2016). Artinya *e-Government* ialah sebagai upaya pemamfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik.

Indrajit (2016) mendefinisikannya secara lebih sederhana, yaitu *e-government is the application of Information and Communication Technology (ICT) by government agencies*. *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah seperti *Wide Area Networks (WAN)* internet, *moble competing*, yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah lainnya.

Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa *E-Goverment* merupakan proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintah secara efisien.

Menurut Indrajid (2016), konsep *electronic government* saat ini memiliki empat jenis yaitu, *government to government, government to business, government to citizen*, serta *government to employees*. 1) *Government to Business*. Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah pembentukan sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam

melakukan aktivitas sehari-harinya, entiti bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Di samping itu, yang bersangkutan juga harus berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasinya sebagai sebuah entiti berorientasi profit. Diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dan menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta.

2) *Government to Governments*. Di era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara-negara untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari kehari. Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh untuk memperlancar kerjasama antar Negara dan kerjasama entiti-entiti negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya dan lain sebagainya.

3) *Government to Citizens/consumers*. Tipe G-to-C ini merupakan aplikasi *E-Government* yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat. Dengan kata lain tujuan utama dari dibangunnya aplikasi *E-Government* bertipe G-to-C adalah

untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari.

4) *Government to Employees. Government-to-Employee (G2E)* merupakan salah satu bentuk e-government yang mencakup seluruh aktivitas penyediaan layanan maupun informasi antara unit pemerintah dengan pegawainya (Indrajid, 2016).

Pengembangan *E-Government* berdasarkan Inpres No.3 Tahun 2003 adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Untuk mengembangkan sistem manajemen dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, maka pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi *E-government*. Melalui pengembangan *E-Government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah dengan cara: 1) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi; 2) Membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah berkerja secara terpadu, untuk menyederhanakan akses kesemua informasi layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah.

Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah melalui jaringan informasi, pengembangan *E-Government* dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkat yaitu (Soendjojo,

2013): 1) Tingkat Pertama (Persiapan). a) Pembuatan *situs web* sebagai media informasi dan komunikasi setiap lembaga dan b) Sosialisasi *situs web* untuk internal dan publik. 2) Tingkat Kedua (Pematangan). a) Pembuatan *situs web* informasi publik yang bersifat interaktif dan b) Pembuatan antar keterhubungan dengan lembaga lain. 3) Tingkat Ketiga (Pemantapan). a) Pembuatan *situs web* yang bersifat transaksi pelayanan publik dan b) Pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain. 4) Tingkat Keempat (Pemanfaatan). Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat *Government to Government (G2G)*, *Government to Business (G2B)*, *Government to Citizens/consumers (G2C)*. Sedangkan menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, tuntutan perubahan No. 18 Strategi 6 melaksanakan Pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur. Setiap perubahan berpotensi menimbulkan ketidakpastian, oleh karena itu pengembangan *E-Government* perlu direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan sasaran yang terukur, sehingga dapat dipahami dan diikuti semua pihak.

2.1.3 Konsep *e-Procurement*

Pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau disebut juga *E-procurement* merupakan sistem informasi yang memungkinkan inovasi dalam pemerintahan, mengubah platform teknologi dan cara pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa yang terlibat dengan penyedia. Menurut Davila *et al.*, (2003) *e-procurement* yaitu sebagai suatu teknologi yang

dirancang untuk memfasilitasi perolehan barang oleh organisasi komersial ataupun pemerintah melalui teknologi internet. Meningkatnya tekanan persaingan bisnis telah mendorong perusahaan untuk mengadopsi *e-procurement* sebagai strategi mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan (Majdalawieh & Bateman, 2008). *E-Procurement* merupakan pengadaan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mencapai informasi yang lebih baik, nilai uang, efisiensi, dan memaksimalkan efektivitas pengadaan yang berbasis web atau internet.

Proses pengadaan secara konvensional dianggap tidak efisien dan efektif lagi dalam mendukung kegiatan bisnis. Beberapa manfaat penerapan *e-procurement* yang didapat pemerintah dijelaskan oleh Reddick (2004), diantaranya biaya administrasi yang digunakan untuk aktivitas pengadaan barang/jasa lebih rendah disebabkan oleh berkurangnya jumlah orang atau pegawai dalam pelaksanaan aktivitas pengadaan, serta penghematan pada waktu pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa. Neef (2013) memberikan pendapat bahwa paling tidak terdapat delapan manfaat penerapan *e-procurement*, yaitu: 1) Biaya transaksi yang lebih rendah, 2) Pemesanan yang lebih cepat, 3) Pilihan terhadap vendor yang lebih luas, 4) Proses yang terstandarisasi sehingga pengadaan barang lebih efisien, 5) Kontrol yang lebih baik terhadap proses pengeluaran pengadaan barang dan tingkat kepatuhan pegawai yang lebih baik, 6) Menyediakan akses internet yang lebih luas kepada pembeli, 7) Kertas kerja yang lebih sedikit dan

mengurangi pengulangan prosedur administratif, dan 8) Membantu penyusunan ulang terhadap proses pengadaan barang

Berikut tujuan adaptasi *e-procurement* di bidang pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengadaan barang/jasa.
- b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
- c. Mempermudah dalam proses pencarian data dan informasi terkait pengadaan jasa konstruksi.
- d. Memastikan proses pengadaan barang/jasa pemerintah lebih cepat dan akurat.
- e. Menjamin ketersediaan peluang, aksesibilitas, dan hak bagi penyedia barang dan jasa.
- f. Menciptakan kondisi yang kondusif sehingga terjadi persaingan yang sehat antar penyedia jasa.
- g. Menciptakan kondisi yang kondusif bagi aparatur pemerintah dan menciptakan organisasi komunikasi online guna mengurangi frekuensi pertemuan langsung antara penyelenggara jasa konstruksi dengan panitia pengadaan.
- h. Memaksimalkan tingkat inventaris dengan menerapkan praktik pengadaan yang efisien.
- i. Mengurangi penggunaan sumber daya manusia selama proses pengadaan.

- j. Meminimalkan biaya pengeluaran kontrak melalui penggunaan teknologi dengan tujuan meningkatkan kesadaran pengguna akan fasilitas kontrak yang ada, kemudian mempermudah untuk mengevaluasinya.
- k. Meminimalkan biaya transaksi melalui teknologi yang mengotomatiskan proses yang sebelumnya masih dicetak (berbasis kertas), meminimalkan, serta menstandarisasi proses dan dokumentasi.

Prinsip *E-Procurement* sebagai sistem pengadaan barang dan jasa menurut Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu: 1) Efektif, berprinsip bahwa dalam pengadaan barang dan jasa harus berupaya memakai dana serta daya seminimal mungkin untuk mencapai kualitas serta tujuan. 2) Efisien, berprinsip bahwa pengadaan barang dan jasa sesuai dengan keperluan serta tujuan yang sudah ditetapkan dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya. 3) Transparan, berprinsip bahwa dalam pengadaan barang dan jasa harus jelas dan dapat diketahui dengan luas mengenai semua ketentuan dan informasi yang berkaitan oleh penyedia barang dan jasa. 4) Terbuka, berprinsip bahwa pengadaan barang dan jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang dan jasa yang memenuhi kriteria atau persyaratan spesifik berdasarkan pada ketentuan serta prosedur yang pasti. 5) Berkompetensi, berprinsip bahwa dalam pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan melalui persaingan lelang yang sehat dan tidak ada intervensi yang mengganggu terwujudnya mekanisme pasar dalam pengadaan barang dan jasa. 6) Adil (tidak diskriminasi), berprinsip bahwa dalam pengadaan barang dan jasa harus memberikan perlakuan yang sama untuk

semua calon penyedia barang dan jasa serta tidak berpihak pada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kebutuhan nasional, dan 7) Akuntabel, berprinsip bahwa dalam pengadaan barang dan jasa harus sesuai ketentuan serta ketetapan dalam pelaksanaannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

E-Procurement perlu dilakukan secara bertahap agar *e-procurement* semakin baik dalam penerapannya. Secara umum tahapan penerapan *e-procurement* terdiri dari 4 (empat) tahap, yaitu: 1) Penayangan informasi. Informasi yang dimaksud adalah informasi umum dan paket pekerjaan 2) Proses CTI (*Copy To Internet*), yaitu tahap penerapan *e-procurement* melalui penayangan informasi, proses, dan hasil pengadaan barang dan jasa, 3) Pelaksanaan semi *e-procurement* yaitu kegiatan pengadaan barang dan jasa yang sebagian prosesnya dilakukan melalui media internet secara interaktif antara peserta lelang dan panitia lelang, dan 4) Pelaksanaan full *e-procurement* yaitu proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan transaksi secara penuh melalui media internet, namun dalam pelaksanaan *e-procurement* secara full belum dapat diterapkan di Indonesia.

2.1.4 *e-catalogue* (Katalog Elektronik)

E-catalogue (Katalog Elektronik) adalah sistem digital yang digunakan oleh pemerintah untuk memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Sistem ini memungkinkan lembaga pemerintah untuk melakukan pemilihan penyedia barang atau jasa berdasarkan daftar produk dan layanan yang telah disetujui dan tersedia di dalam katalog digital. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, *e-catalogue* memberikan solusi bagi

pengadaan yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 mengenai Katalog Elektronik, E-katalog adalah sistem informasi elektronik yang menyediakan daftar informasi, termasuk jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga, serta informasi relevan lainnya dari berbagai penyedia barang dan jasa. E-katalog mencakup barang, pekerjaan konstruksi, serta jasa lainnya. E-katalog dan e-Purchasing adalah bagian dari sistem pengadaan elektronik atau e-Procurement. E-Purchasing bertujuan untuk memfasilitasi proses pemilihan barang atau jasa secara langsung melalui sistem e-katalog, memungkinkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) memilih barang atau jasa dengan efisiensi biaya dan waktu yang lebih baik dibandingkan dengan metode tender lainnya.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bertanggung jawab atas pengembangan dan pengelolaan sistem ini di Indonesia. Menurut Rahayu (2021), *e-catalogue* mempermudah proses pengadaan karena pihak pengguna bisa langsung memilih produk atau jasa yang diperlukan tanpa harus melalui proses tender yang panjang.

E-catalogue dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu katalog nasional, katalog sektoral, dan katalog lokal. Katalog nasional mencakup barang atau jasa yang pengadaannya berlaku untuk seluruh Indonesia, sementara katalog sektoral dan lokal lebih spesifik berdasarkan kebutuhan kementerian,

lembaga, atau daerah tertentu. Contoh katalog sektoral adalah yang diterapkan oleh Kementerian Agama untuk pengadaan jasa konstruksi, di mana produk atau jasa yang tersedia disesuaikan dengan kebutuhan sektoral kementerian tersebut. Menurut Syafii et al. (2020), jenis-jenis katalog ini dirancang untuk mempermudah setiap instansi dalam memilih produk yang relevan dengan kebutuhan mereka, sehingga proses pengadaan lebih efisien dan terarah.

Manfaat utama dari *e-catalogue* adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan adanya sistem yang terstandarisasi, risiko penyimpangan atau korupsi dalam proses pengadaan bisa diminimalisir. Semua proses dapat dipantau secara elektronik, sehingga meminimalkan interaksi langsung yang bisa menjadi sumber potensi masalah. Di sisi lain, *e-catalogue* juga membantu mempercepat proses pengadaan karena lembaga pemerintah tidak perlu melakukan evaluasi berulang terhadap penyedia barang atau jasa, karena semua yang terdaftar di katalog telah melalui proses verifikasi. Menurut penelitian Putri (2019), penggunaan *e-catalogue* mampu memotong waktu pengadaan hingga 40% dibandingkan dengan metode tender konvensional.

Namun, implementasi *e-catalogue* juga menghadapi sejumlah tantangan, termasuk adaptasi dari pengguna yang belum sepenuhnya familiar dengan sistem ini. Selain itu, ada beberapa masalah teknis yang dapat menghambat jalannya sistem, seperti integrasi dengan aplikasi pengadaan lainnya dan ketergantungan pada jaringan internet yang stabil. Studi oleh

Hamzah (2022) menunjukkan bahwa di beberapa daerah, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi menjadi salah satu penghambat utama dalam penerapan *e-catalogue*. Meski demikian, secara keseluruhan, sistem *e-catalogue* telah memberikan banyak manfaat bagi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia, khususnya dalam hal efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

E-katalog dapat dipahami sebagai sistem elektronik yang menyimpan data mengenai barang, produk, atau layanan. Sebagai bagian dari e-Procurement, e-katalog memiliki peran krusial karena memuat informasi tentang daftar item, spesifikasi, dan harga yang digunakan sebagai acuan untuk membandingkan produk-produk serupa. Dengan menggunakan e-katalog, pengguna layanan dapat memverifikasi apakah penawaran dari penyedia memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Manajemen katalog memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan siklus penuh dari Solusi E-Procurement. Katalog merujuk pada daftar lengkap item yang disusun dengan sistematis dan dilengkapi dengan deskripsi rinci. E-katalog adalah dokumen elektronik yang memuat spesifikasi produk, daftar, dan informasi terkait secara detail, yang dapat diakses oleh pelanggan dan mitra melalui internet. Dengan manajemen katalog yang efisien, hubungan antara pembeli dan pemasok dapat diperkuat, dan informasi tentang produk, pemasok, serta proses pemesanan tersedia secara otomatis. Selain itu, e-katalog juga menyediakan link menuju ulasan produk dan informasi terkait industri. E-katalog menyusun informasi rinci

mengenai produk dan layanan yang ditawarkan, mengklasifikasikan, mengategorikan, dan mendistribusikan informasi produk secara akurat. E-katalog tidak hanya memberikan informasi yang mendetail tetapi juga menawarkan sejumlah manfaat lainnya, yaitu:

- a. Membantu pemasok dalam membuat, menganalisis, dan memvalidasi konten katalog.
- b. Mengelola dan memantau semua komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat.
- c. Memvalidasi format data, logika bisnis, dan struktur kode.
- d. Memantau seluruh proses manajemen katalog.
- e. Memperbarui daftar produk baru di pasar dan membuatnya tersedia untuk pelanggan.
- f. Menyediakan perbandingan fitur produk, memberikan masukan terkait produk, dan menawarkan alternatif produk dan layanan kepada pelanggan.

Manfaat menggunakan e-katalog adalah:

- a. Mengelola katalog secara manual sangat melelahkan dan memakan waktu, serta dapat menjadi mahal. Katalog online memungkinkan data diperbarui dan diakses dengan cepat dan mudah.
- b. Katalog online lebih mudah dicari dan mendukung pemulihan informasi secara instan.
- c. Struktur katalog mempermudah pengelompokan barang/produk, sehingga akses menjadi lebih mudah.
- d. Memungkinkan pemesanan secara online, yang dapat mengurangi biaya.

- e. Meningkatkan akurasi pesanan dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengonfirmasi kutipan dan harga, serta mengurangi waktu percakapan dengan menyediakan detail produk dan spesifikasi secara lengkap.
- f. Pembelian dilakukan dengan memilih item dari katalog online.
- g. Pemasok dapat menerima pesanan pembelian dalam bentuk elektronik.
- h. Data yang lebih akurat mengurangi kesalahan antara faktur dan pesanan pembelian.

Solusi manajemen katalog dapat meningkatkan efisiensi proses pengadaan dengan mencakup desain, manajemen perubahan, dan komunikasi.

2.1.5 *Technology Acceptance Model (TAM)*

Technology Acceptance Model (TAM) yang diperkenalkan oleh Fred Davis pada tahun 1989 adalah kerangka teoretis yang dirancang untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi informasi oleh pengguna. TAM menekankan dua konsep utama, yaitu *Perceived Usefulness (PU)* dan *Perceived Ease of Use (PEOU)*. *Perceived Usefulness* mengacu pada sejauh mana seseorang percaya bahwa penggunaan teknologi akan meningkatkan kinerja mereka dalam pekerjaan, sementara *Perceived Ease of Use* merujuk pada keyakinan bahwa teknologi tersebut mudah untuk digunakan tanpa memerlukan usaha yang berlebihan. Kedua faktor ini sangat penting karena secara langsung mempengaruhi sikap

pengguna terhadap teknologi, serta menentukan niat mereka untuk mengadopsi atau menolak penggunaan teknologi tersebut.

Lebih lanjut, TAM mengusulkan bahwa jika pengguna percaya teknologi tersebut bermanfaat dan mudah digunakan, mereka akan lebih mungkin menerimanya, terlepas dari faktor-faktor eksternal lainnya. Dalam pengembangan lebih lanjut, penelitian empiris telah menunjukkan bahwa PU dan PEOU secara signifikan memengaruhi tingkat adopsi teknologi di berbagai bidang, termasuk dalam dunia bisnis, pendidikan, dan pemerintahan.

a. *Perceived Usefulness* (PU)

Menurut Davis (1989), PU didefinisikan sebagai “sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan kinerja pekerjaannya.” PU adalah konstruksi sentral dalam TAM dan ditemukan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat untuk menggunakan teknologi.

Kegunaan persepsian (*perceived usefulness*) didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan kinerja pekerjaannya (sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa penggunaan suatu teknologi akan meningkatkan kinerjanya) (Jogiyanto, 2008). Dengan demikian jika seseorang percaya bahwa sistem informasi berguna maka dia akan menggunakannya.

Perceived usefulness (kebermanfaatan persepsian) didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang meyakini bahwa penggunaan sistem informasi tertentu akan meningkatkan kinerja pegawainya (Jogiyanto, 2018).

Davis menggunakan 6 buah item untuk membentuk konstruk ini. Keenam item tersebut adalah *work more quickly, job performance, increase productivity, effectiveness, makes job easier dan useful* (Jogiyanto, 2018).

b. *Perceived Ease of Use* (PEOU)

Davis (1989) mendefinisikan PEOU sebagai "sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan bebas dari usaha." PEOU mempengaruhi PU karena teknologi yang lebih mudah digunakan cenderung dianggap lebih bermanfaat. Selain itu, PEOU juga mempengaruhi sikap terhadap penggunaan teknologi secara langsung. Arta & Azizah (2020) menyatakan bahwa *perceived ease of use* adalah suatu sistem dirancang untuk memudahkan pengguna dan tidak menyulitkan. Kemudahan ini memiliki makna bahwa suatu layanan akan mudah dipahami dan dapat dengan mudah dioperasikan, sehingga konsumen akan mudah mempelajari tata cara penggunaan layanan.

Widiyanti (2020) menyatakan bahwa *perceived ease of use* merupakan persepsi mengenai suatu teknologi baru mudah dimengerti, mudah digunakan, mudah dijangkau dan praktis dalam penggunaannya. Adyas (2019) menyatakan bahwa *perceived ease of use* adalah suatu sistem dirancang bukan untuk menyulitkan pemakainya, akan tetapi penggunaan sistem justru mempermudah seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya. Mahanani & Sari (2019) menyatakan bahwa *perceived ease of use* merupakan sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan

suatu teknologi akan bebas dari usaha. Davis dalam Fatuh (2017) mendefinisikan bahwa *perceived ease of use* adalah tingkat dimana seseorang percaya bahwa penggunaan sistem tertentu dapat mengurangi usaha seseorang dalam mengerjakan sesuatu.

Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) adalah model yang digunakan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi individu dalam menerima dan menggunakan teknologi. TAM diperkenalkan oleh Fred Davis pada 1989 dan menekankan dua faktor utama yang menentukan penerimaan teknologi, yaitu *Perceived Usefulness* (persepsi kegunaan) dan *Perceived Ease of Use* (persepsi kemudahan penggunaan). Dalam konteks implementasi *e-catalogue*, kedua faktor ini sangat relevan. *E-catalogue* sebagai teknologi pengadaan barang dan jasa digital memerlukan penerimaan dari pengguna untuk dapat diimplementasikan dengan efektif. Menurut teori TAM, jika pengguna merasa bahwa *e-catalogue* dapat meningkatkan efisiensi pengadaan (persepsi kegunaan), dan jika mereka merasa bahwa *e-catalogue* mudah digunakan (persepsi kemudahan penggunaan), maka mereka lebih cenderung menerima dan menggunakan teknologi ini dalam proses pengadaan.

Dalam kaitannya dengan *Perceived Usefulness*, *e-catalogue* dapat membantu pengguna, seperti pegawai pemerintah, untuk mempercepat dan mempermudah proses pengadaan barang dan jasa. Pengguna tidak lagi harus melalui proses tender manual yang memakan waktu, melainkan dapat langsung memilih penyedia jasa atau barang dari katalog yang telah tersedia.

Menurut penelitian Syafii et al. (2020), para pegawai yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa di Kementerian Agama merasa bahwa *e-catalogue* meningkatkan efisiensi kerja mereka karena mempercepat pengambilan keputusan dan mengurangi risiko human error dalam proses tender. Dengan demikian, persepsi bahwa *e-catalogue* bermanfaat dalam meningkatkan produktivitas akan mendorong penerimaan pengguna terhadap teknologi ini.

Selanjutnya, *Perceived Ease of Use* juga menjadi faktor penting dalam penerapan *e-catalogue*. Jika sistem katalog elektronik sulit digunakan atau terlalu rumit, maka pengguna mungkin akan merasa enggan untuk beralih dari metode konvensional ke teknologi baru. Namun, *e-catalogue* dirancang dengan antarmuka yang user-friendly dan intuitif sehingga pengguna dapat dengan mudah menavigasi dan memahami cara kerja sistem. Sebagai contoh, penelitian oleh Putri (2019) menunjukkan bahwa antarmuka yang sederhana dan panduan penggunaan yang jelas membantu meningkatkan penerimaan *e-catalogue* di kalangan pegawai pemerintah. Selain itu, dukungan pelatihan bagi pengguna untuk menguasai teknologi ini juga berperan dalam meningkatkan persepsi kemudahan penggunaan.

Meskipun demikian, tantangan dalam penerapan TAM pada *e-catalogue* tetap ada, terutama dalam hal adaptasi pengguna terhadap teknologi baru. Beberapa pengguna mungkin membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dari proses pengadaan manual ke digital. Menurut Hamzah (2022), resistensi terhadap perubahan dan kurangnya keterampilan teknologi dapat menjadi hambatan utama dalam

penerimaan *e-catalogue* di berbagai instansi pemerintah. Oleh karena itu, untuk memastikan penerapan TAM yang optimal, pemerintah perlu menyediakan pelatihan yang cukup serta memastikan bahwa infrastruktur teknologi mendukung penggunaan *e-catalogue*. Dengan demikian, persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan yang positif akan mendorong adopsi *e-catalogue* secara lebih luas dan efektif.

2.1.6 Teori Efektivitas

Efektivitas secara teoretis merujuk pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu sistem atau organisasi. Konsep ini berkaitan dengan seberapa baik suatu tindakan atau keputusan berhasil mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konteks ini, efektivitas tidak hanya diukur dari hasil yang dicapai, tetapi juga dari proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan utama dari efektivitas adalah untuk memastikan bahwa sumber daya yang digunakan, baik itu waktu, tenaga, atau dana, dapat memberikan hasil yang optimal dan sesuai dengan harapan.

Menurut David (2001), efektivitas adalah ukuran untuk menilai sejauh mana suatu sistem atau organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas berfokus pada aspek hasil yang dicapai, yang berarti bahwa jika hasil yang diinginkan tercapai sesuai dengan perencanaan, maka proses tersebut dapat dianggap efektif. Dalam hal ini, efektivitas lebih menekankan pada tujuan akhir yang ingin dicapai daripada cara atau proses yang digunakan untuk mencapainya. Oleh karena itu, efektivitas berhubungan erat dengan hasil yang terukur dan jelas.

Sementara itu, Robbins dan Judge (2017) mengemukakan bahwa efektivitas organisasi dapat diukur melalui berbagai dimensi, seperti kinerja individu, kepuasan pelanggan, serta kontribusi terhadap tujuan jangka panjang organisasi. Efektivitas dalam organisasi tidak hanya bergantung pada pencapaian tujuan jangka pendek, tetapi juga pada kemampuan untuk mempertahankan dan memperbaiki proses secara berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa efektivitas tidak hanya terkait dengan hasil akhir, tetapi juga dengan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan dan kebutuhan yang berkembang.

Dalam perspektif manajemen, efektivitas sering dikaitkan dengan pencapaian hasil yang maksimal dalam mengelola sumber daya yang terbatas. Dalam hal ini, efektivitas bukan hanya berfokus pada tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga pada bagaimana cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai contoh, dalam manajemen proyek, efektivitas dapat diukur dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan biaya dan waktu yang telah dialokasikan untuk proyek tersebut (Kerzner, 2017). Dengan kata lain, efektivitas mengukur apakah proyek tersebut berhasil mencapai tujuannya tanpa pemborosan sumber daya yang tidak perlu.

Selain itu, efektivitas juga dapat dilihat dari segi kualitas hasil yang dicapai. Menurut Kotter (2012), efektivitas tidak hanya terkait dengan mencapai tujuan, tetapi juga dengan bagaimana hasil tersebut memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Dalam organisasi, efektivitas berkaitan dengan kemampuan untuk menghasilkan produk atau layanan yang sesuai

dengan kebutuhan pelanggan dan yang dapat mempertahankan tingkat kepuasan yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas juga mencakup faktor kualitas dalam proses pencapaian tujuan.

Pengukuran efektivitas juga melibatkan penilaian terhadap dampak jangka panjang yang dihasilkan dari suatu tindakan atau keputusan. Efektivitas tidak hanya diukur dari pencapaian tujuan dalam jangka pendek, tetapi juga dari bagaimana hasil tersebut memberikan dampak yang berkelanjutan pada organisasi atau masyarakat. Sebagai contoh, dalam kebijakan publik, efektivitas dapat diukur dengan sejauh mana kebijakan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang (Hill & Hupe, 2009).

Di sisi lain, efektivitas tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi hasil yang dicapai. Hal ini juga diakui oleh Mintzberg (2009) yang berpendapat bahwa efektivitas suatu organisasi atau sistem sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal yang sering kali berada di luar kendali organisasi tersebut. Misalnya, perubahan ekonomi, politik, atau sosial dapat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, efektivitas harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, yang mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hasil akhir.

Secara keseluruhan, efektivitas merupakan konsep yang sangat penting dalam teori organisasi dan manajemen. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan dengan cara yang optimal, baik dari segi hasil yang dicapai

maupun proses yang digunakan untuk mencapainya. Konsep ini mengharuskan adanya pengukuran yang jelas dan terukur terhadap tujuan yang ingin dicapai, serta mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi hasil. Dalam prakteknya, efektivitas sering kali diukur dengan menggunakan berbagai indikator yang mencakup aspek kinerja, kualitas, dan dampak jangka panjang dari suatu tindakan atau keputusan.

2.1.7 Teori Efisiensi

Efisiensi merujuk pada kemampuan untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Dalam konteks ekonomi dan manajemen, efisiensi sering kali diartikan sebagai upaya untuk meminimalkan biaya atau penggunaan sumber daya dalam rangka menghasilkan output yang diinginkan.

Koontz dan Wehrich (2010) mendefinisikan efisiensi sebagai "kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan mengurangi penggunaan sumber daya." Mereka menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya secara optimal agar tujuan organisasi dapat tercapai tanpa pemborosan. Definisi ini menyoroti bahwa efisiensi tidak hanya mengenai hasil, tetapi juga bagaimana cara pencapaiannya dilakukan dengan cara yang hemat.

Drucker (1973) menyatakan bahwa "efisiensi adalah melakukan hal-hal dengan benar." Dalam konteks ini, efisiensi berkaitan dengan proses dan cara kerja yang optimal. Drucker menekankan bahwa untuk mencapai efisiensi, organisasi harus fokus pada prosedur yang baik dan praktik manajemen yang

efektif, sehingga dapat menghasilkan output yang diinginkan dengan cara yang tepat.

Allen (1998), mengartikan efisiensi sebagai "perbandingan antara hasil yang diperoleh dan sumber daya yang digunakan untuk mencapainya." Menurutnya, efisiensi melibatkan penilaian seberapa baik suatu organisasi atau sistem memanfaatkan inputnya untuk mencapai output yang diinginkan. Allen menyoroti pentingnya pengukuran efisiensi dalam manajemen proyek dan pengembangan produk, di mana hasil yang dicapai harus sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan.

Menurut Farrell (1957), efisiensi dibagi menjadi dua komponen utama, yaitu efisiensi teknis dan efisiensi alokatif. Efisiensi teknis berkaitan dengan kemampuan memaksimalkan output dengan jumlah input tertentu, sementara efisiensi alokatif terkait dengan kemampuan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan nilai atau harganya di pasarasanya, efisiensi tidak hanya berkaitan dengan penghematan biaya, tetapi juga dengan pemanfaatan waktu dan sumber daya secara lebih baik untuk meningkatkan produktivitas. Dalam dunia bisnis, efisiensi sering kali menjadi kunci keberhasilan perusahaan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Organisasi yang mampu menjalankan proses bisnis mereka dengan efisien akan mendapatkan keunggulan kompetitif, karena mereka dapat menawarkan produk atau layanan yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah. Menurut Robbins dan Coulter (2018), manajer di perusahaan harus berfokus pada peningkatan

efisiensi operasional untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya tanpa mengorbankan kualitas produk atau layanan .

Efisiensi dapat diukur melalui perbandingan antara input yang digunakan (seperti tenaga kerja, waktu, dan biaya) dengan output yang dihasilkan (seperti produk atau layanan).

a. Input dan Output

Efisiensi merupakan suatu ukuran yang menggambarkan seberapa baik sumber daya digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konteks ini, input dapat berupa tenaga kerja, waktu, dan biaya yang dikeluarkan dalam suatu proses produksi atau penyediaan layanan. Output, di sisi lain, merujuk pada hasil akhir yang dihasilkan, baik berupa produk maupun layanan yang siap disampaikan kepada konsumen. Semakin kecil rasio antara input dan output, semakin efisien suatu proses tersebut. Menurut Neely et al. (1995), efisiensi dapat diukur dengan membandingkan total biaya dan waktu yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau layanan dengan volume output yang dihasilkan, sehingga memberikan gambaran jelas mengenai efektivitas penggunaan sumber daya yang ada.

b. Rasio Input dan Output

Mengukur efisiensi melalui perbandingan antara input dan output sangat penting dalam dunia bisnis dan organisasi. Dalam proses ini, manajer dapat menggunakan rasio yang relevan untuk mengevaluasi kinerja operasional. Misalnya, dalam industri manufaktur, rasio produk yang

dihasilkan dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja dan waktu yang digunakan dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai efisiensi operasional. Jika rasio output terhadap input menunjukkan hasil yang positif, maka hal tersebut menandakan bahwa proses produksi berjalan dengan efisien. Menurut Gunasekaran et al. (2001), pemahaman yang baik tentang hubungan antara input dan output dapat membantu organisasi dalam meningkatkan proses dan mengurangi pemborosan.

c. Dampak pada Keputusan Manajerial

Pemantauan efisiensi input dan output tidak hanya penting untuk mengukur kinerja, tetapi juga untuk pengambilan keputusan manajerial yang lebih baik. Dengan memahami seberapa efisien suatu proses berjalan, manajemen dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Efisiensi yang tinggi akan berkontribusi pada peningkatan profitabilitas dan daya saing perusahaan di pasar. Menurut Porter (1996), perusahaan yang dapat memanfaatkan efisiensi dengan baik dalam pengelolaan sumber daya akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan dibandingkan dengan kompetitornya.

Efisiensi menjadi sangat penting dalam sektor publik, terutama dalam hal pengelolaan anggaran dan pelayanan masyarakat. Pemerintah di seluruh dunia terus mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara agar dapat memberikan layanan publik yang berkualitas dengan biaya yang lebih rendah.

Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, penggunaan sistem *e-catalogue* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses pengadaan dengan meminimalkan waktu dan biaya yang diperlukan untuk mencari dan memilih penyedia jasa atau barang. Menurut Verhoef et al. (2019), pengembangan teknologi informasi dalam sektor publik dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional dengan menyederhanakan proses administrasi dan mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi atau kesalahan dalam pengelolaan .

Dalam konteks penerapan *e-catalogue* di lingkungan pemerintah, faktor-faktor seperti pengetahuan teknis, dukungan dari manajemen, dan kesiapan infrastruktur sangat menentukan keberhasilan upaya untuk meningkatkan efisiensi pengadaan. Oleh karena itu, selain berfokus pada hasil akhir yang efisien, organisasi juga harus mempertimbangkan proses yang diperlukan untuk mencapai efisiensi tersebut.

Namun, meskipun menjadi tujuan utama dalam banyak organisasi, hal ini tidak selalu mudah dicapai. Ada berbagai faktor yang dapat menghambat pencapaian efisiensi, seperti kurangnya pelatihan, resistensi terhadap perubahan teknologi, atau ketidakseimbangan antara permintaan dan kapasitas sumber daya.

2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Penulis, dan Tahun Penelitian	Objek Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Penelitian
1	Ferry Hanggara Samudra, 2022. <i>Evaluasi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan e-Procurement di Kota Malang Ditinjau dari Segi Efisiensi dan Efektivitas</i>	Pengadaan pekerjaan konstruksi di Kota Malang	Kuantitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pada penelitian ini pengadaan jasa konstruksi di Kota Malang sudah termasuk efisien dan efektif, setelah dilakukan penelitian tentang kepuasan responden terhadap pengadaan jasa konstruksi di Kota Malang sudah termasuk Sangat Baik. Dengan demikian penelitian ini membuktikan bahwa pengadaan jasa konstruksi di Kota Malang dengan menggunakan e-procurement sudah efektif, efisien dan memuaskan.
2	Faniyah, I., Putra Pratama, B., & Yendri, N., 2024. <i>Penggunaan Sistem e-Katalog dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Proyek Pemerintah</i>	Pengadaan pekerjaan konstruksi pemerintah	Kualitatif	Persaingan secara sehat ini menjamin untuk mengedepankan etika bisnis. akses pasar berpengaruh signifikan terhadap Prinsip Akuntabel Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Secara

	<i>dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha</i>			<p>parsial persaingan bisnis tidak berpengaruh signifikan terhadap Prinsip Akuntabel Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada proses e katalog. Pengaruh Sistem E-Katalog Dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Barat Terhadap Persaingan Usaha telah sesuai dengan prinsip Persaingan usaha yakni prinsip Persaingan sehat atau healthy competition, dimana Persaingan sehat memiliki ciri-ciri menjamin persaingan di pasar yang berhubungan erat dengan pencapaian efisiensi seperti pengaruh dari sistem E- katalog yang dijalankan.</p>
3	<p>Emyrasasi, K. Purwono, H., Setiya N, 2023. <i>Evaluasi Usability Website E-Katalog Lokal LKPP Dengan Menggunakan Metode Usability Testing</i></p>	<p>Pengadaan barang dan jasa di Temanggung</p>	<p>Kuantitatif dan kualitatif</p>	<p>Hasil yang didapatkan secara analisis deskripsi secara kuantitatif adalah penggunaan e-katalog masih tergolong sedang. Namun pada hasil kualitatif masih banyak pengguna baik pembeli maupun penjual masih mengeluhkan aplikasi yang kurang <i>user friendly</i>.</p>

4	Haryadi, I., Yuli S., 2024. <i>Studi Penerapan E-Katalog Dalam Meningkatkan Kinerja Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten Magelang</i>	Kinerja penyerapan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Magelang	Deskriptif Kualitatif	Penerapan e-katalog memudahkan penyusun anggaran untuk menyampaikan usulan dengan harga barang/jasa yang tercantum dalam e-katalog sehingga perencanaan anggaran lebih realistis sehingga tingkat penyerapan anggaran dapat mencapai rata-rata 94,01%. Penyerapan anggaran Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana masih berada pada kisaran 80%, dikarenakan kondisi empiris terkait pelayanan kesehatan masyarakat dan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana.
5	Nasution, I.N., Hanifah M.A., Almira S., 2017. <i>Redesain Sistem Informasi E-Katalog Berdasarkan Evaluasi Usability (Studi Kasus Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Padang Panjang)</i>	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Padang Panjang	Kualitatif	Penelitian ini menggunakan pendekatan <i>human-centered design</i> (HCD) untuk melakukan evaluasi usability sistem dengan fokus pada efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna. Hasil penelitian menunjukkan evaluasi atas desain solusi mampu mempertahankan efektivitas sistem e-katalog di 100%, dan terjadi peningkatan

				dalam efisiensi dan kepuasan pengguna.
--	--	--	--	--

